



Analisis Kebijakan Kerja Layak bagi Pekerja UMKM di Kota Yogyakarta

Nathasya Aura Thirranay¹, Mayada Putri Lalia², Indah Prabawati³, Wilda Sumarsyah⁴

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi : 25040674057@mhs.unesa.ac.id, 25040674075@mhs.unesa.ac.id,
indahprabawati@unesa.ac.id, wildasumarsyah@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in supporting the economy of the Special Region of Yogyakarta, particularly in creating job opportunities and improving the welfare of the community. With the rapid advancement of digital technology, MSMEs need to adapt in order to survive and compete in the modern economy. This study was conducted to analyze the implementation of MSME development policies in the City of Yogyakarta and to determine their contribution to the creation of decent jobs for MSME workers. This study employs a qualitative approach through a literature review method, utilizing various sources, including scientific journals, government publications, and official statistical reports for the period 2020–2025. The data obtained was then analyzed descriptively through data simplification, data presentation, and the drawing of conclusions. This study reveals that digitalization is a key factor in supporting the development of SMEs in Yogyakarta. Government programs, such as Sibakul Jogja, are deemed effective in helping SME operators expand their marketing reach, access business mentoring, and enhance the use of digital technology in their operations. The number of MSMEs participating in the program increased from 253,890 in 2022 to 346,757 in 2023, reflecting growing awareness among business owners of the importance of using digital technology. However, several obstacles remain, such as low digital literacy, a lack of product innovation, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, efforts to enhance digital capacity, strengthen business innovation, and implement labor protection policies must continue to be developed to support the sustainable growth of MSMEs and the creation of decent jobs.

Keywords: SMEs, Digitalization, Public Policy, Decent Work, Sibakul Jogja

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin pesat, UMKM perlu menyesuaikan diri agar mampu bertahan sekaligus bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta serta mengetahui kontribusinya terhadap terciptanya pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja UMKM. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, serta laporan statistik resmi selama periode 2020–2025. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan proses penyederhanaan data, penyampaian data, dan

kemudian menarik kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa digitalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan UMKM di Yogyakarta. Program pemerintah, seperti Sibakul Jogja, dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran, memperoleh pendampingan usaha, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Jumlah UMKM yang terlibat dalam program tersebut meningkat dari 253.890 unit pada tahun 2022 meningkat 346.757 unit di tahun 2023, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan teknologi digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, seperti rendahnya kemampuan literasi digital, minimnya inovasi produk, dan koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital, penguatan inovasi usaha, dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perlu terus dikembangkan guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan serta terciptanya pekerjaan yang layak.

Kata Kunci: *UMKM, Digitalisasi, Kebijakan Publik, Pekerjaan Layak, Sibakul Jogja*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam menopang perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, UMKM juga menjadi sektor yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan dan keterampilan. Kehadiran UMKM turut membantu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pemerataan ekonomi, sehingga sektor ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah maupun nasional.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung perkembangan UMKM melalui sejumlah program, seperti pemberian akses pembiayaan, pelatihan pengembangan usaha, pendampingan digitalisasi, serta penyederhanaan proses perizinan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong UMKM agar dapat berkembang secara mandiri serta meningkatkan daya saingnya. Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan modal, rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, serta kurangnya inovasi dalam menjalankan usaha. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait juga belum berjalan secara maksimal sehingga beberapa program pengembangan UMKM belum memberikan hasil yang optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengembangan UMKM dari beragam perspektif. Menurut (Tambunan, 2019) perkembangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait akses terhadap permodalan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pelaku usaha. Selanjutnya, penelitian dari (Sedyastuti, 2018) menyebutkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan daya saing UMKM, meskipun penerapannya masih terkendala rendahnya literasi digital pelaku usaha. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Prasetyo & Huda, 2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM belum berjalan secara terpadu sehingga program-program yang ada cenderung berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, (Niode, 2009)

menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, industri keuangan, dan pihak swasta dalam mendukung pengembangan UMKM. Sementara itu, penelitian dari (Rifa'i et al., 2024) mengungkapkan bahwa perlindungan tenaga kerja pada sektor UMKM masih belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan.

Pada kota Yogyakarta, keberadaan UMKM mempunyai kontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan peluang kerja untuk masyarakat. Berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY tahun 2022, jumlah UMKM di wilayah DIY tercatat lebih dari 302 ribu unit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang memiliki jumlah UMKM paling tinggi (Sulistyo & Anggraini, 2025). Perkembangan UMKM di Yogyakarta juga mengalami peningkatan seiring adanya transformasi digital melalui Program Sibakul Jogja. Program tersebut menunjukkan peningkatan jumlah mitra UMKM dari 253.890 unit pada tahun 2022 meningkat 346.757 unit di tahun 2023, yang menandakan tingginya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usahanya (Sulistyo & Anggraini, 2025). Selain itu, Pemerintah Daerah DIY menegaskan bahwa pelaku UMKM perlu melakukan transformasi dan peningkatan kapasitas melalui penguatan kompetensi, pemanfaatan digitalisasi, serta peningkatan daya saing usaha agar mampu tumbuh secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar kajian masih lebih banyak membahas aspek pengembangan usaha, akses permodalan, dan transformasi digital UMKM. Kajian yang secara khusus membahas implementasi kebijakan UMKM dalam kaitannya dengan penciptaan kerja layak bagi pekerja masih terbatas, terutama di Kota Yogyakarta. Pada kenyataannya, isu mengenai pekerjaan layak menjadi salah satu perhatian utama dalam *SDGs (Sustainable Development Goals)*, terutama pada point ke 8 yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan terhadap pekerja UMKM, seperti pemenuhan hak atas upah yang layak, jaminan sosial, serta kepastian kerja, hingga saat ini masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan di sektor UMKM (Nararya et al., 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana kebijakan pengembangan UMKM tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta, mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendukung terciptanya pekerjaan yang layak bagi pekerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait kondisi pengembangan UMKM di Yogyakarta sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai data yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM serta kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi pekerja UMKM di Kota Yogyakarta. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah nasional, prosiding seminar atau konferensi, buku, artikel resmi pemerintah, serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Referensi yang digunakan berjumlah sekitar 10–15 sumber utama yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian, diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025 agar informasi yang digunakan tetap relevan dan mutakhir, serta berasal dari sumber terpercaya seperti jurnal terakreditasi dan lembaga pemerintah resmi. Penelitian ini juga menggunakan artikel resmi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membahas pentingnya transformasi UMKM sebagai upaya meningkatkan perkembangan dan daya saing usaha, yang diakses melalui jogjapro.go.id (Pemda DIY, 2026). Selain itu, data tambahan diperoleh dari publikasi Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS DIY.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka yang dilakukan secara online maupun offline. Peneliti menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan digitalisasi UMKM, kebijakan pemerintah daerah, serta implementasi program pemberdayaan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2023). Tahapan analisis dilakukan melalui proses penyederhanaan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Creeswell & Creeswell, 2018). Tahap penyaringan data mencakup pemilihan informasi relevan sesuai dengan penelitian, kemudian data disusun secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian literatur untuk memberikan gambaran mengenai transformasi dan perkembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung perkembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan berbagai literatur yang telah dikaji, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah DIY juga terus memotivasi para pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi digital agar usaha yang dijalankan mampu bertahan sekaligus bertumbuh di tengah ketatnya persaingan bisnis. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan usaha, hingga penguatan pemasaran berbasis digital.

Salah satu program yang banyak dibahas dalam berbagai sumber literatur adalah Program Sibakul Jogja. Program ini dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan

UKM DIY sebagai platform digital yang digunakan untuk mendukung pendataan, pembinaan, dan pemasaran UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM di DIY. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah mitra UMKM yang tergabung dalam Program Sibakul Jogja, yaitu dari 253.890 unit pada tahun 2022 meningkat menjadi 346.757 unit di tahun 2023. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa Sebagian besar pelaku UMKM sudah memahami pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha mereka.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten maupun kota. Berdasarkan data Bappeda DIY tahun 2022, jumlah UMKM di DIY mencapai lebih dari 302 ribu unit usaha dengan Kabupaten Sleman sebagai daerah yang memiliki jumlah UMKM paling banyak. Banyaknya jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM mempunyai peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. UMKM bukan sekadar sumber mata pencaharian bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Berdasarkan berbagai literatur yang dianalisis, transformasi digital dianggap dapat membantu UMKM dalam memperluas cakupan pemasaran serta meningkatkan kemampuan bersing usaha. Penggunaan media social, marketplace, serta berbagai platform digital lainnya membantu pelaku UMKM menjangkau lebih banyak konsumen tanpa terbatas oleh wilayah geografis. Selain itu, digitalisasi juga membantu proses promosi produk menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pelaku UMKM, seperti rendahnya kemampuan digital, kurangnya inovasi produk, serta minimnya pemahaman terkait pemasaran online.

Pemerintah Daerah DIY juga menegaskan bahwa UMKM perlu terus melakukan transformasi agar mampu berkembang dan bersaing di era modern. Transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas produk, penguatan manajemen usaha, dan perluasan jaringan pemasaran. Hal ini sejalan dengan artikel resmi Pemerintah Daerah DIY yang menjelaskan bahwa UMKM harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. jogjaprovo.go.id.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan ekonomi digital. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan digital, penguatan inovasi usaha, dan pendampingan secara berkelanjutan perlu terus dilakukan agar UMKM di DIY mampu berkembang lebih optimal dan memiliki kemampuan bersaing yang kuat di masa mendatang.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam menunjang perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam membuka kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemajuan teknologi digital juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM, terutama melalui program pemerintah seperti Sibakul Jogja yang memfasilitasi pelaku usaha dalam pemasaran, pendataan, serta pengembangan usaha berbasis teknologi. Bertambahnya jumlah UMKM yang terlibat dalam program tersebut menandakan bahwa para pelaku usaha semakin memahami pentingnya penggunaan teknologi digital untuk memperkuat daya saing usaha di era ekonomi modern. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, di antaranya rendahnya kemampuan literasi digital, kurangnya inovasi produk, serta belum optimalnya kerja sama antarinstansi pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM secara menyeluruh.

Di samping berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM juga perlu memperhatikan terciptanya kondisi kerja yang layak bagi tenaga kerja. Pemenuhan hak pekerja, seperti perlindungan sosial, kepastian kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja, harus menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan UMKM. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus meningkatkan program pelatihan, pendampingan usaha, dan dukungan terhadap proses digitalisasi agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terkait keterkaitan antara kebijakan pengembangan UMKM dengan perlindungan tenaga kerja sehingga dapat tercapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja pada sektor UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2024*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. In *Writing Center Talk over Time* (5th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Nararya, A. P., Raharjo, P. S., & Najicha, F. U. (2026). Kebijakan Pengaturan Hak Upah Pekerja UMKM Di Kota Madiun Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 12094–12099. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5607>
- Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah Dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2(1), 1–10.
- Pemda DIY. (2026). *UMKM Harus Bertransformasi Agar Naik Kelas*. Jogjaprov.Id. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/umkm-harus-bertransformasi-agar-naik-kelas>
- Prasetyo, A., & Huda, M. (2019). Analisis Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kebumen. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 18(1), 26–35.

<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v18i1.309>

- Rifa'i, A., Sari, Ramdayani, S. S., & Jaya, Y. P. (2024). Sosialisasi Inflasi Dan Investasi: Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota Rumah Hijrah Pontianak. *Gandhi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 68-75. <https://doi.org/10.33830/g-jpm.v3i3.10582>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117-127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, A. F., & Anggraini, O. (2025). Implementasi Inovasi Program Sibakul Jogja Dalam Meningkatkan Pemasaran Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Manajemen Business Innovation Conference-MBIC*, 8, 568-579.
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- .